

## ABSTRAK

Persoalan kehutanan dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan terutama mengenai penebangan liar, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai tindak pidana kehutanan salah satu pasal yaitu pada Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a. Ketentuan pemidanaan Pasal tersebut mengatur ancaman minimal khusus, namun pada Pengadilan Negeri Rembang memberi sanksi pidana dibawah minimal khusus.

Oleh karena itu didalam penelitian ini diberi judul Tinjauan yuridis terhadap putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan studi terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif –analitis dengan metode yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menghasilkan bahwa di Pengadilan Negeri Rembang putusan Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Rbg memberikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana kehutanan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dasar pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan pemidanaan dibawah minimal khusus yaitu hakim dalam memutus perkara yang ditangani dengan mencari kebenaran materiil, dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka akan diketahui motif dan tujuan dari pelaku melakukan tindak pidana. Selain itu juga dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang hakim telah memperhatikan pada teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif atau tujuan dan teori gabungan. Dengan memperhatikan pada teori pemidanaan tersebut, hakim dalam memberikan putusan mempertimbangan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai benar-benar memberikan manfaat dan pelajaran bagi terdakwa, sehingga dengan pidana yang diberikan diharapkan terdakwa jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang lebih baik (*speciale preventif*). Selain itu juga untuk menakut-nakuti orang banyak dengan maksud agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa (*general preventif*).

Kata kunci : Pemidanaan, Di Bawah Minimal Khusus, Kehutanan.

## ABSTRACT

The problems of forestry are getting more apprehensive from time to time, particularly about illegal logging, illegal, wood, transport and trade. The constitution number 18 year 2013 concerning prevention and eradication of forest destruction governing the criminal activity of forestry. One of the article is article 12 letter d Jo article 83 subsection (1) letter a. The punishment stipulation governing the special minimum threat, but Rembang state court imposes a criminal sanction below the special minimum.

And due this case, the title of this research named the juridical observation toward punishment stipulation under the special minimum for criminal act doer. The study of verdict in Rembang state court. This research is heading for understanding ada analyzing the punishment verdict under the special minimum for doer of criminal act forestry in Rembang state court, the punishment verdict under special minimum for the doer of criminal act of forestry observed from the perspective of goal punishment. The method used is descriptive-analysis with juridical sociological method.

The observation results Rembang state court verdict number 43/Pid.Sus/2014/PN.Rbg, imposes punishment to doer of criminal act of forestry, that is to spend 6 month in prison and to pay a Rp.500.000,00 fine. The basic consideration of judgment is that the judge, in deciding any case he handles, seeks for material rightness and it is based upon lawful fact wicth is revealed in the court session, so it will be known both what the motive and the purpose are. Beside that, it is also consired the possibilites which are burden and alleviate the accused.

The punishment judgment under special minimum to the doer of criminal activity forestry in Rembang state court has been concerning to punishment theories, those are absolute, relative and combination theories. Based on those theories, the judge considers about the goal punishment that want to be reached really give profits and losson at once. In order it would give shock therapy for the accused, so he would never do the same mistake, and correct his attitude later on (speciale preventif). In other side, to scare many pople. With the purpose not to do what as was done the defendant (general preventif).

Keyword : Punishment below, Minimum of specifically, Forestry.